

IDEOLOGI DIBALIK DOKTRIN DWIFUNGSI ABRI

I Putu Nopa Suryawan, I Ketut Laba Sumarjiana

Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Mahasaraswati Denpasar

Email: putunopa@gmail.com

ABSTRAK

Orde Baru merupakan salah satu rezim dimana ABRI mempunyai peran ganda atau sering juga disebut dengan Dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI adalah doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa ABRI memiliki dua tugas yaitu menjaga keamanan dan ketertiban Negara serta memegang kekuasaan dan mengatur Negara. Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi strategis di dalam pemerintahan. Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini yaitu (1). Apa tugas utama ABRI bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (2). Mengapa ABRI berperan penting pada masa Orde Baru. Penelitian ini dilandasi oleh berbagai konsep teori yaitu : Ideologi, Kekuasaan, Dwifungsi ABRI, dan Orde Baru. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dwifungsi ABRI dijadikan sebagai alat kekuasaan oleh Presiden Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya karena karakteristik militer yang tunduk terhadap atasan (Doktrinasi). Dengan adanya Dwifungsi ABRI, kegiatan politik masyarakat khususnya yang tidak sejalan dengan apa yang digariskan oleh pemerintah berada di bawah kekangan. Namun demikian, terjadi sebuah stabilitas politik yang mampu menjadi pendorong bagi keberhasilan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Ideologi dibalik Dwifungsi ABRI adalah ideologi kekuasaan. Hal ini terbukti selama 32 tahun Presiden Soeharto berhasil mempertahankan kekuasaannya.

Kata Kunci : Ideologi, Kekuasaan, Dwifungsi Abri, Orde Baru

ABSTRACT

Regime Orde Baru is one where the military has a dual role, or often called Dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI is a doctrine in military environments Indonesia which states that the Armed Forces have two tasks is to maintain security and order in the State and hold the power and set the state. With this dual role, the military was allowed to hold strategic positions in government. The problems that arise in this study are (1). What are the main tasks for the People and the Armed Forces of the Republic of Indonesia (2). Why does the Armed Forces play an important role in the Orde Baru. This study is based on the various theoretical concepts, namely: ideology, power, Dwifungsi ABRI, and Orde Baru. Data collection techniques by observation and interviews. The method used is a qualitative research method with qualitative descriptive data analysis. The results of this study indicate that the dual function of ABRI used as a tool of power by President Soeharto to perpetuate his power because the military karakteristik subject to superiors (doctrinal). With the dual function of the military, political activity, especially people who are not in line with what is required by the government is under restraint. However, there was a political stability which is able to be a driving force for the success of the programs launched by the government. Ideology behind the dual function of ABRI is an ideology of power. This was evident during the 32 years of Soeharto managed to maintain power.

Keywords : ideology, power, dwifungsi abri, orde baru

PENDAHULUAN

Kelahiran konsep Dwifungsi ABRI tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa, oleh karenanya memang sulit untuk mengerti Dwifungsi ABRI tanpa mengaitkannya dengan kerangka sejarah

perjuangan dan kebudayaan bangsa Indonesia. Dari perjalanan sejarah Indonesia, maka sangat jelas kelihatan bahwa ABRI memiliki komitmen yang begitu kuat pada bidang hankam dan non-hankam. Di dalam konstitusi Negara kita, Undang – Undang Dasar 1945,

tidak ada satu ketentuan yang meletakkan militer di luar bingkai-bingkai kegiatan sosial, ekonomi, dan politik, sebagaimana tidak adanya ketentuan di dalam UUD 1945 yang mengharuskan militer untuk menangani masalah non-hankam.

Konsep Dwifungsi ABRI dipahami sebagai jiwa, tekad, dan semangat pengabdian ABRI, untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang hankam Negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa, dalam rangka menciptakan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dari pengertian tersebut, ABRI merasa harus senantiasa memiliki jiwa, mempunyai tekad, dan semangat pengabdian di dalam dua bidang yaitu hankam dan non-hankam. Kekhawatiran beberapa pihak bahwa Dwifungsi ABRI akan mengarah kepada pemerintahan yang otoriter sebenarnya tidak perlu ada, karena ABRI sebagai kekuatan sosial politik telah merupakan bagian dari sistem demokrasi Pancasila yang mekanismenya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Keberadaan ABRI sebagai kekuatan sosial politik dalam sistem demokrasi Pancasila dan adanya kewajiban untuk menumbuhkembangkan demokrasi Pancasila pada satu sisi yang dihadapi-hadapkan dengan adanya tuntutan masyarakat akan kehidupan demokrasi yang semakin meningkat, pada sisi lain mengharuskan ABRI untuk secara terus menerus mengadakan penyesuaian-penyesuaian, selama tuntutan tersebut dalam rangka memperkuat sistem kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dwifungsi ABRI adalah doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa ABRI memiliki dua tugas yaitu menjaga keamanan dan ketertiban Negara serta memegang kekuasaan dan

mengatur Negara. Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi strategis di dalam pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi* (Sugiyono,2014:9). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pribadi yang diamati.

Selain pendekatan kualitatif,dalam rancangan penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan seperti :

1. Pendekatan Sosiologis yaitu peristiwa sejarah tidak bisa dipisahkan dengan sifat interaksi antar individu maupun kelompok. Karena bentuk – bentuk interaksi inilah yang melahirkan berbagai konfigurasi sistem sosial yang biasanya terlibat dalam peristiwa sejarah. Teori – teori sosial serta metodologi terkait akan sangat membantu sejarawan menjelaskan hubungan – hubungan kausal dalam konteks – konteks tertentu dari peristiwa sejarah.
2. Pendekatan Antropologi sangat membantu sejarawan mengusut hubungan kausal kontekstual peristiwa sejarah yang merefleksikan sistem nilai budaya suatu masyarakat.
3. Pendekatan Politik yaitu peristiwa sejarah sangat erat hubungannya dengan dimensi pola hubungan kekuasaan

bahkan sangat didominasi oleh fenomena politik, karena gambaran sejarah umumnya berpusat pada tokoh – tokoh elite kekuasaan (Pageh,2010:62).

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian untuk memperoleh data berdasarkan buku sumber, jurnal, artikel-artikel, laporan penelitian yang ada di perpustakaan. Hampir semua penelitian memerlukan studi kepustakaan, walaupun orang sering membedakan antara riset kepustakaan dengan riset lapangan, keduanya tetap memerlukan penelusuran pustaka. Perbedaan utamanya hanyalah terletak pada fungsi, tujuan, dan kedudukan studi pustaka dalam masing-masing riset tersebut.

Subjek Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan terhadap sejarah Indonesia terutama pada masa Orde Baru.
2. Fokus penelitian ini adalah Ideologi dibalik Doktrin Dwifungsi ABRI karena pada masa Orde Baru ABRI selain sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, juga sebagai kekuatan sosial politik yang merupakan alat perjuangan rakyat.

Objek Penelitian

Sebagai objek dalam penelitian ini adalah perpustakaan. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian di berbagai perpustakaan yang ada di Provinsi Bali seperti Perpustakaan Daerah Bali di Jl. Teuku Umar, dan Perpustakaan Universitas Mahasaraswati Denpasar di Jl. Soka Denpasar. Pada penelitian ini penulis juga melakukan pengambilan data melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan informan yang berkaitan dengan Dwifungsi ABRI.

Instrumen Penelitian

Instrumen sangat menentukan baik tidaknya hasil dari suatu penelitian. Instrumen dalam penelitian adalah alat ukur, yaitu dengan instrumen penelitian ini dapat dikumpulkan data sebagai alat untuk menyatakan besaran atau persentase serta lebih kurangnya dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif. Sehingga dengan menggunakan instrumen yang dipakai sangat berguna sebagai alat baik untuk mengumpulkan data maupun pengukuran data. Penulis melakukan observasi atau mengumpulkan data dengan menggunakan bollpoin, buku tulis, buku sejarah nasional Inonesia yang relevan, artikel – artikel yang ada hubungannya dengan penelitian serta naskah laporan penelitian dari peneliti sebelumnya.

Metode pengumpulan data

Metode yang di gunakan yaitu metode kualitatif dengan data kualitatif yang berupa pendapat pernyataan atau *judgement* sehingga tidak berupa angka akan tetapi berupa kata-kata atau kalimat. Data kualitatif di peroleh dari berbagai teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis data, diskusi atau observasi lapangan yang telah dituangkan dalam bentuk transkrip (Siregar,2014:16).

Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Syaodih,2006:220). Pengamatan yang dimaksud disini adalah melihat secara langsung sumber-sumber sejarah yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini seperti buku-buku sejarah Indonesia, artikel-artikel tentang Dwifungsi ABRI, Jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan Dwifungsi ABRI serta buku-buku penunjang penelitian yang ada di perpustakaan. Dengan observasi peneliti akan mendapatkan data yang sesuai, oleh karena itu teknik ini dirasakan sangat membantu dalam

penyesuaian sekaligus penyempurnaan instrumen penelitian terutama menyangkut konsep abstrak di lapangan.

Wawancara

Dalam penelitian ini juga menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat yang mengetahui peristiwa yang terjadi. Dalam penelitian ini melakukan wawancara secara mendalam terhadap informan yang telah di tentukan sebelumnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah di berikan untuk memperkuat hasil penelitian, posisi sebagai informan dalam wawancara dalam bentuk orang tunggal yang sangat mengetahui cerita dari kesejarahan atau peristiwa yang akan di teliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini maka Informan yang akan diwawancarai adalah mantan-mantan ABRI dan Sejarawan agar sesuai dengan masalah yang diteliti yaitu tentang Ideologi dibalik Doktrin Dwifungsi ABRI. Teknik wawancara menggunakan kuesioner sebagai alat untuk memandu proses wawancara. Pertanyaan yang akan di sampaikan harus sesuai dengan hal atau peristiwa yang akan di teliti agar jawaban dari sumber bisa di jamin kebenarannya.

Analisis Data

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi – dimensi uraian. Analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel dan sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal

ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantive (Moleong,2002:103).

Setelah memperoleh data melalui metode wawancara dan observasi , peneliti melalui mulai menggorganisasikan data-data tersebut dengan mendengarkan hasil rekaman wawancara secara berulang-ulang. Dengan demikian data-data yang diperoleh dapat disesuaikan dengan teori dan permasalahan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Sesuai dengan tahapan penelitian ini, maka pengolahan datanya dapat berupa pengolahan tahap deskriptif. Teknik analisa data dalam penelitian kualitatif menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya (Sugiyono,2014:147).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas Utama ABRI bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

ABRI merupakan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang membawahi empat institusi yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Setelah reformasi pada tahun 1998, MPR telah menetapkan pemisahan tugas antara Tentara dengan Polisi. Ketiga angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara) berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari

Tugas ABRI pada masa Orde Baru

Dwifungsi ABRI adalah suatu doktrin di lingkungan Militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu: pertama, menjaga keamanan dan ketertiban Negara; dan kedua, memegang kekuasaan dan mengatur Negara. Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi strategis di dalam pemerintahan. Pernyataan di atas berdasarkan beberapa pidato Soeharto, yang mengatakan bahwa sejalan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai alat pertahanan dan keamanan, maka ABRI harus dapat dengan tepat melaksanakan peranannya sebagai kekuatan sosial politik. Sedangkan dalam terbentuknya ABRI sebagai kekuatan sosial, memiliki dua buah fungsi yaitu fungsi stabilisator dan fungsi dinamisator.

1. ABRI sebagai Dinamisator

Kemampuan ABRI untuk berkomunikasi dengan rakyat, untuk merasakan dinamika masyarakat, dan untuk memahami serta merasakan aspirasi serta kebutuhan-kebutuhan rakyat, memungkinkan ABRI untuk secara nyata membimbing, menggugah dan mendorong masyarakat untuk lebih giat melakukan partisipasi dalam pembangunan. Dalam hal ini dapat di contohkan dalam manunggal desa yang lebih di kenal dengan ABRI masuk desa. ABRI masuk desa ini membantu segala hal yang berkaitan dengan pembangunan desa dalam rangka mengabdikan kepada masyarakat. Kemampuan tersebut dapat mengarah kepada dua jurusan. Program AMD mempunyai 3 tujuan pokok yaitu :

1. menguji sistem keamanan pertahanan rakyat semesta di lapangan.
2. membantu rakyat dalam semua aspek kehidupan.

3. mengumpulkan permasalahan untuk dicari pemecahannya.

ABRI memilih desa sebagai sasaran utama pembangunan. Hal tersebut karena desa beserta masyarakatnya merupakan penunjang di dalam usaha bela Negara. Pelaksanaan program AMD mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Titik berat sasaran adalah program air bersih, listrik masuk membuka akses desa, penanggulangan bencana alam, musim kemarau panjang, dan mengatasi wabah-wabah penyakit menular. AMD juga melaksanakan kegiatan-kegiatan non-fisik seperti pemberian ceramah tentang kesadaran bernegara dan kesadaran membela Negara. Selain kegiatan fisik / membantu pembangunan rumah sakit, pembuatan jalan-jalan. Kegiatan non-fisik tersebut merupakan bagian dari upaya membangkitkan kembali semangat dan cinta tanah air khususnya dikalangan generasi muda. Dampak positif lainnya adalah membantu berkembangnya peranan lembaga-lembaga kemasyarakatan di pedesaan seperti LKMD, PKK, Karang Taruna, pramuka dan lain-lain.

Menurut informan Bapak I Wayan Kacong selaku Sejarawan menuturkan bahwa pelaksanaan Dwifungsi ABRI pada masa itu adalah sebagai berikut.

ABRI masuk desa merupakan tugas sosial ABRI. ABRI memperbaiki pura, memperbaiki jalan, kerja bakti, menangani masalah-masalah sosial masyarakat, dan mengatasi gejolak-gejolak yang ada di masyarakat (Wawancara, 15 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa ABRI Masuk Desa (AMD) sangat bermanfaat bagi masyarakat. AMD banyak membantu masyarakat mulai dari membuka kampung-kampung baru, penanggulangan bencana alam, membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat, sampai memberikan ceramah tentang kesadaran bernegara dan kesadaran

membela Negara sehingga AMD banyak mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Berikut adalah contoh gambar ABRI Masuk Desa.



2. ABRI sebagai Stabilisator

Kemampuan ABRI untuk berkomunikasi dengan rakyat, untuk merasakan dinamika masyarakat dan untuk memahami aspirasi-aspirasi yang hidup dalam masyarakat, membuat ABRI menjadi salah satu jalur penting dalam rangka pengawasan sosial. Kesadaran nasional yang tinggi yang dimiliki oleh setiap prajurit ABRI merupakan suatu penangkal yang efektif terhadap pengaruh sosial yang bersifat negatif dari budaya serta nilai-nilai asing yang masuk membanjiri masyarakat Indonesia. Sifat ABRI yang realistis dan pragmatis dapat mendorong masyarakat agar dalam menanggulangi masalah-masalah berlandaskan tata pilar yang nyata dan berpijak pada kenyataan situasi serta kondisi yang dihadapi, dengan mengutamakan nilai kemanfaatan bagi kepentingan nasional.

Kemudian rakyat akan dapat secara tepat waktu menentukan prioritas-prioritas permasalahan dan sasaran-sasaran yang diutamakan. Dengan demikian akan dapat dinetralisasi atau dikurangi ketegangan, gejala-gejala dan keresahan-keresahan yang pasti akan melanda masyarakat yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan dan

karenanya mengalami perubahan sosial yang sangat cepat.

3. Kekayaan ABRI

Kekayaan ABRI adalah bagian dari pelaksanaan Dwifungsi ABRI yaitu ABRI menugaskaryakan anggota-anggotanya di bidang-bidang sosial politik, ekonomi, sosial budaya, kerohanian dan keagamaan. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI adalah salah satu golongan karya dan berkewajiban ikut aktif dalam segala usaha kegiatan masyarakat dan Negara di luar bidang pertahanan dan keamanan untuk mencapai tujuan nasional. ABRI lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, dan bukan merupakan tentara professional model barat, sehingga ABRI tidak membatasi diri pada pelaksanaan tugas pertahanan dan keamanan saja. Secara yuridis formal, fungsi sosial politik ABRI tercantum dalam UUD 1945.

Fungsi sosial politik ABRI, makin melembaga dalam tata kehidupan masyarakat berdasarkan Ketetapan MPRS tanggal 05 Juli 1966, yakni TAP No. XXIV/MPRS/1966, dan Undang-Undang No.20 Tahun 1982. Pelaksanaan fungsi Sosial politik ABRI berdasarkan kepada Pancasila (landasan idiil), UUD 1945 (landasan konstitusional), dan Catur Dharma Eka Karma (landasan doktrin). Tujuan fungsi sospol ABRI adalah identik dengan aspirasi ABRI yakni menuju :

1. Terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia seperti yang dimaksudkan dalam UUD 1945.
2. Tercapainya masyarakat yang adil dan makmur merata baik spiritual dan material berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara RI.
3. Tercapainya dan terpeliharanya ketahanan nasional di segala bidang dan aspek kehidupan Negara serta rakyat Indonesia.

Sedangkan tugas pokok peran sosial politik ABRI dalam rangka mencapai tujuannya adalah :

1. Ikut serta secara aktif mengamankan dan melaksanakan pembangunan nasional.
2. Meningkatkan kemampuan ABRI sebagai kekuatan sosial politik untuk melaksanakan kegiatan kekaryaan dan menyeraskannya dengan kekuatan-kekuatan sosial politik lainnya.
3. Melaksanakan kekaryaan ABRI dengan menggunakan daya dan dana yang tersedia.
4. Menyelenggarakan operasi-operasi sosial politik..

ABRI sebagai kekuatan sosial politik, bersama-sama kekuatan sosial politik lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Perwujudannya dengan cara ikut serta melaksanakan kegiatan pembangunan di segala bidang baik bidang sosial politik, bidang ekonomi, maupun bidang kerohanian/keagamaan.

Politik kekaryaan ABRI adalah identik dengan politik pemerintah. Sedangkan strategi kekaryaan ABRI selalu disesuaikan dengan strategi yang ditentukan oleh pemerintah. Di dalam melaksanakan kekaryaan tersebut, ABRI adalah aparat pelaksana kebijakan pemerintah yang dituangkan di dalam program-program pembangunan (Program Pelita). ABRI menjalankan politik yang telah digariskan oleh pemerintah. Sedangkan pelaksanaan kekaryaan ABRI dalam bidang legislative dan eksekutif bertujuan menjamin terlaksananya program pemerintah berdasarkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Di samping mengadakan pengamanan fisik yaitu mencegah segala kemungkinan dan menindak segala gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul.

ABRI sebagai kekuatan sosial politik harus dapat melaksanakan pengamanan politisi, psikologis, bagi kebijaksanaan pemerintah. ABRI di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berperan mengamankan Pancasila dan UUD 1945 agar jangan sampai kedua landasan tersebut diubah. Sedangkan di DPR, ABRI berperan sebagai stabilisator dan dinamisator. Bentuk partisipasi ABRI sebagai kekuatan sosial politik juga terlihat dengan duduknya anggota-anggota ABRI dalam badan-badan penyelenggaraan pemilu mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah yaitu dalam Lembaga Pemilihan Umum (LPU), Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I), Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II (PPD II), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pengawas Pelaksana (Panwaslak) mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan. Partisipasi lainnya adalah pemberian penerangan mengenai segala sesuatu tentang pemilu berupa penyuluhan kepada masyarakat umumnya dan khususnya keluarga besar ABRI, dalam rangka pelaksanaan pendidikan politik rakyat.

Menurut informan Bapak I Made Sutarta selaku mantan ABRI menuturkan tentang kekaryaan ABRI adalah sebagai berikut.

Kekaryaan ABRI ditugaskan di legislatif, Eksekutif, Yudikatif. ABRI sebagai kekuatan Hankam dan sebagai kekuatan sosial politik tidak dapat dipisahkan. Kalau ABRI sebagai kekuatan Hankam merupakan alat Negara yang dikendalikan oleh pemerintah, maka peran ABRI di bidang stabilitas nasional cukup dominan sehingga muncul fraksi-fraksi ABRI. Fraksi ABRI melindungi kepentingan rakyat dan menyalurkan aspirasi dan tuntutan rakyat. Setiap anggota fraksi ABRI diberi penugasan wilayah. ABRI di pemerintahan tetap mendapat gaji ABRI di tambah uang saku. Selain duduk di pemerintahan, ABRI juga ikut

sebagai pengamanan pemilu (Wawancara, 14 Mei 2016).

Dengan demikian, berdasarkan pendapat informan dapat dijelaskan bahwa ABRI juga ikut duduk di dalam pemerintahan. ABRI di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berperan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan di DPR (Dewan Permusyawaratan Rakyat) ABRI berperan sebagai stabilisator dan dinamisator. ABRI mempunyai jatah 20 % dan tidak dapat diganggu gugat.

Ideologi Dibalik Doktrin Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru

Dwifungsi ABRI adalah suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa militer mempunyai dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban Negara, yang kedua memegang kekuasaan dan mengatur Negara. Dengan peran ganda ini militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan. Perwira ABRI harus diberi kesempatan melakukan partisipasinya di dalam pemerintahan atas dasar individu, artinya tidak ditentukan oleh institusi ABRI. Secara konseptual Dwifungsi ABRI hakekat sebenarnya merupakan suatu pemikiran yang wajar yaitu ABRI melakukan pengabdian kepada bangsa dan Negara secara total, baik di bidang pertahanan dan keamanan (Hankam) maupun bidang non-Hankam. Namun, dalam prakteknya di lapangan terjadi penyimpangan terhadap konsepsi semula. Melalui konsep kekaryaan, peran militer yang mencolok dibuktikan dengan banyaknya perwira militer yang menduduki jabatan-jabatan politik dan pemerintahan.

Perwira-perwira militer, mulai dari menjadi Kepala Desa/Lurah, Camat, Bupati/Walikota, Gubernur, sampai menjadi menteri. Selain itu, militer menduduki jabatan-jabatan lain yang seharusnya diduduki oleh

birokrat sipil mulai dari Kepala Dinas, Kepala Kantor Departemen, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, sampai Sekretaris Jenderal. Dwifungsi ABRI juga dijadikan sebagai alat kekuasaan oleh Presiden Soeharto, yang mengakibatkan rakyat kurang simpati kepada ABRI. Orde Baru bertekad melaksanakan program pembangunan yang kesuksesannya menuntut adanya stabilitas keamanan. Atas nama keamanan, Orde Baru kemudian memberikan tanggung jawab ini kepada ABRI. ABRI kemudian mulai terlihat semena-mena, padahal tujuan utamanya untuk menjaga keamanan dan pertahanan Negara. Namun yang dirasakan masyarakat justru tindak kekerasan terhadap segala bentuk protes atau demonstrasi yang dilakukan berbagai kalangan, selain itu ABRI juga sering menyelesaikan berbagai konflik dengan kekerasan. Ideologi dibalik Doktrin Dwifungsi ABRI adalah Ideologi kekuasaan karena ABRI jadi terlihat sebagai rekan penguasa dibanding institusi militer yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan pertahanan Negara dan juga terjebak menjadi alat kekuasaan yang senantiasa melakukan pembenaran atas setiap kebijakan pemerintah karena sudah di atur dalam Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara” jadi pada masa itu ABRI harus tunduk kepada Presiden Soeharto dan harus menjalankan segala perintah dari Presiden.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penyajian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Tugas utama ABRI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

2. Pada masa Orde Baru, ABRI mempunyai peran ganda yang sering di sebut dengan Dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI adalah suatu doktrin di lingkungan militer yang menempatkan ABRI baik sebagai kekuatan Hankam juga sebagai kekuatan sosial politik. Salah satu bentuk perwujudan fungsi ABRI sebagai kekuatan sosial politik adalah penugasan prajurit ABRI dalam lembaga, instansi, badan atau organisasi di luar jajaran ABRI. Selain itu, militer mengisi kursi di lembaga legislatif baik di MPR, DPR maupun DPRD yang diperoleh berdasarkan penunjukan bukan melalui pemilihan umum. Hal ini menyebabkan hubungan sipil dan militer sudah bergeser dari pola kesetaraan atau kesejajaran antara sipil dan militer cenderung menjadi pola dominasi militer atas sipil. Peran militer yang dominan tentu saja menimbulkan dampak yang negatif . Penempatan ABRI diluar instansi ABRI pada dasarnya tetap membawa masalah bagi hubungan antara sipil dan militer, terutama karena perbedaan karakter. Dalam pilar struktur politik pada masa Orde Baru dapat dikatakan bahwa hubungan Golkar dan ABRI tidak dapat terpisahkan. ABRI dan Golkar dapat diibaratkan sebagai mesin pelanggeng kekuasaan Presiden Soeharto. Dengan keberpihakan militer kepada Golkar, maka usaha dan strategi militer untuk memenangkan Golkar dalam setiap Pemilihan Umum menjadi lebih di utamakan daripada urusan pertahanan dan keamanan. Adanya anggota ABRI yang diangkat tanpa harus bersusah payah untuk aktif dan terlibat dalam kerja partai politik secara langsung memupuk kesuksesan Golkar untuk terus mengangkat dan mempertahankan Soeharto sebagai Presiden.

DAFTAR PUSTAKA :

- Balai Pustaka. (1984). *Sejarah Nasional Indonesia* (p. 32). PN Balai Pustaka.
- Abdurahman. D. (2007). *Metodelogi Penelitian Sejarah*. Ar-Ruzz Media. <https://doi.org/10.31227/osf.io/fv8gb>
- Djohan, A. J. 2015. *Lima Pilar Kepemimpinan*. Malang : Media Nusa Creative
- Pageh, I. M.2010.*Metodelogi Sejarah Dalam Perspektif,Pendidikan*.Singaraja:Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.
- Siregar,S.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif* Jakarta:Kencana.
- Soebijono.1992. *Dwifungsi ABRI perkembangan dan peranannya dalam kehidupan politik di Indonesia*.Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.Bandung:Alfabeta.
- Sukarna.1981. *Ideologi Suatu Studi Politik*.Bandung:Alumni